



PERAN KEBIJAKAN PESANTREN AMANAH MUHAMMADIYAH KOTA TASIKMALAYA DALAM MEMBENTUK KARAKTER SANTRI ISLAMI

Fitria Rayani Rahman¹, Intan Oktaviani Agustina², Siti Zahra Al Munawaroh³
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia
Kampus Daerah Cibiru
Jl. Pendidikan No. 15, Cibiru Wetan Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
e-mail: fitriarayani@upi.edu, intanoktaviani@upi.edu,
sitizahraalmunawaroh@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini tentang Peran Kebijakan Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam Membentuk Karakter Santri Islami. Lembaga pendidikan pesantren adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal ini merubah mindset dan pandangan terhadap pendidikan pesantren sebelumnya yang dipandang sebagai lembaga pendidikan non formal yang kurang mendapat pengakuan dan apresiasi terhadap lulusannya. PenMetode yang dipakai yaitu metode kualitatif berupa transkrip wawancara, dan catatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran dari kebijakan pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam membent Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya telah ditetapkan sebagai lembaga yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya oleh Kementerian Agama dan kebijakan pesantren yang diterapkan merupakan upaya pihak pesantren untuk membentuk karakter santri yang islami. Menurut penulis dalam membentuk karakter Islami, Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya memiliki kebijakan untuk mengatur para santri mengikuti kegiatan yang terstruktur setiap harinya. Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya banyak memasukan unsur - unsur Islami diantaranya dalam hal ibadah, dan kegiatan lainnya.

Kata Kunci: Pendidikan, Kebijakan, pesantren

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Maka sudah sepatutnya dalam penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan adanya suatu kebijakan. Kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani yaitu 'polis', yang berarti kota. Dalam KBBI kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dalam pendidikan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam praktik pendidikan.¹

Terdapat tingkatan dalam kebijakan pendidikan. Dimulai dari tingkat internasional, nasional, provinsi, daerah, hingga ke sekolah masing - masing. Setiap tingkatan kebijakan tersebut,

¹ Sukarman Purba dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

harus dapat menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang. Seperti kebijakan pendidikan nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia, harus dipahami dan ditaati oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia.² Meskipun terdapat kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan daerah, sekolah pun diberi hak otonomi untuk mengatur sendiri kebijakan yang akan mereka terapkan. Karena untuk beberapa hal, hanya sekolah itu sendiri yang paling tahu keadaannya dan apa yang paling dibutuhkannya. Dengan makna lain kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan.³

Inti dari tujuan pendidikan secara nasional terdapat dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Namun dalam mencapainya, digunakan cara yang berbeda - beda dengan kata lain kebijakan yang digunakan pun memiliki ciri khas di setiap sekolah.

Seperti halnya Sokola Rimba yang digagas oleh Butet Manurung, dimana setiap sekolah yang dirintis mengintegrasikan pendidikan ke dalam struktur komunitas atau kaum adat tertentu. Dengan kata lain sistem dan kebijakan yang dipakai dalam pendidikannya, menyesuaikan dengan kebiasaan dan kehidupan orang-orang suku pedalaman sehari-hari. Karena tujuan dari pendidikan alternatif ini adalah mencerdaskan para kaum adat tanpa merubah tatanan kehidupan yang telah mereka miliki.

Selain itu, terdapat kebijakan pendidikan di tingkat sekolah yang dimiliki oleh banyak sekolah di Indonesia yaitu, pendidikan pondok. Pendidikan pondok atau dalam umat islam lebih dikenal dengan nama pondok pesantren, telah lahir sejak masa Rasulullah SAW. Pendidikan keislaman pada saat itu dilaksanakan di rumah – rumah para sahabat, salah satunya rumah Arqam bin Abil Arqam. Di Indonesia, penggagas pendidikan pondok pesantren ini adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sudah banyak orang tahu bahwa dalam pendidikan pondok pesantren, ada kebijakan dan sistem yang khas. Tentunya kebijakan ini memiliki tujuan yang sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003.

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural disebut pusat budaya Islam, yang disahkan

² Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan : Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif* (Bandung: Cendekia Press, 2018).

³ Indah Mei Diastuti dan Agus Sulton, “The Effectiveness of Problem Based Learning (PBL) Method Through Marquee Model to Cultivate Literacy,” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 4, no. 2 (2020).

atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara de facto tidak dapat diabaikan keberadaannya.⁴ Pondok pesantren memiliki kebijakan berupa keharusan para pendidik, para tenaga pendidik, dan para peserta didiknya hadir dan tinggal dalam suatu lingkungan yang sama selama masa pendidikan. Dengan cara tersebut, diharapkan para peserta didik dapat lebih terpantau. Pendidik dan tenaga pendidik akan membimbing dan mengayomi para peserta didiknya selama 24 jam. Hal ini merupakan kebijakan yang paling pokok dan beda dari penyelenggaraan pendidikan lainnya. Salah satu ciri khas lain dalam pendidikan pesantren adalah adanya pendidikan karakter Islami. Sesuai dengan cita – cita pendidikan nasional, bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa...”. Karena kecerdasan intelektual tanpa diikuti dengan karakter dan akhlak yang mulia maka tidak akan memiliki nilai lebih.⁵

Salah satu pondok pesantren yang memiliki kebijakan tersebut adalah Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, menganut sistem *boarding school* dalam pendidikannya. Dengan kata lain, pendidikan formal berupa sekolah dilaksanakan bersama dengan pendidikan non formal yang berupa pendidikan Islami. Oleh karena itu mata pelajaran keagamaan banyak dilaksanakan juga di kelas formal.

Ada beberapa kebijakan yang diterapkan dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Tentunya kebijakan – kebijakan tersebut diharapkan dapat membentuk karakter islami para santrinya. Dalam tulisan ini, akan disajikan peran dari kebijakan-kebijakan Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam membentuk karakter Islami para peserta didiknya.

KAJIAN PUSTAKA

Pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren adalah tempat belajar para santri, sedangkan arti dari pondok yaitu rumah atau tempat tinggal para santri yang sederhana terbuat dari bambu. Kata pondok berasal dari Bahasa Arab yaitu “*Funduq*” yang berarti asrama atau hotel. Ada beberapa istilah untuk pondok pesantren, di Aceh dikenal dengan istilah *dayah* atau *rangkang* atau *menuasa*. Sedangkan di Minangkabau disebut dengan istilah *surau*. Pondok pesantren merupakan tempat penampungan sederhana bagi pelajar yang jauh dari kampung halamannya. Pondok pesantren bukanlah semata-mata diartikan sebagai tempat

⁴ Syadidul Kahar, Muhammad Irsan Barus, dan Candra Wijaya, “Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri,” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 2 (2019): 170–78.

⁵ Nuraeni Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren,” *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 3, no. 1 (2021): 1–14.

tinggal para santri untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh pondok pesantren tersebut, melainkan juga sebagai tempat latihan bagi santri untuk hidup mandiri.⁶

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Mastuhu). Lalu, pesantren merupakan sebuah asrama pendidikan tradisional, dimana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Komplek ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Zamakhsyari Dhofier). Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, dimana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut (Sudjoko Prasojo).⁷

Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli di negara Indonesia. Pesantren merupakan model sistem pendidikan pertama dan tertua yang ada di Indonesia. Pendidikan pesantren telah mengilhami model sistem pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan berasrama. Pesantren telah berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.⁸ Dari pesantren terlahir tokoh-tokoh perjuangan (banyak yang menjadi syuhada ‘pahlawan’) dan tokoh pembangunan bangsa. Pesantren telah berperan penting dalam pembangunan pendidikan Indonesia yang multikultur seperti ada banyaknya kelompok etnis, status sosial, ekonomi, dan kelompok pendidikan agama. Pesantren telah menerapkan kurikulum identitas diri.⁹ Lulusan pesantren dewasa ini telah menunjukkan dinamika positif yakni kesanggupan lulusan untuk merespon perkembangan masyarakat yang majemuk. Hal tersebut dilakukan melalui pembelajaran ilmu agama Islam yang kaafah terutama pada pesantren khalaf ‘modern’.

Untuk mempertahankan eksistensinya pesantren selalu bersikap mandiri tidak bergantung pada subsidi pemerintah, dalam mempertahankan keberlangsungannya, kebutuhan hidupnya, serta penyelenggaraan pendidikannya pesantren sepenuhnya melibatkan potensi dan partisipasi

⁶ Aep Tata Suryana dkk., “Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia,” *JURNAL SERAMBI ILMU* 21, no. 2 (2020): 273–86.

⁷ Izzi Asrori, “Peran pesantren dalam mengontrol perilaku santri: studi Pondok Pesantren Al-Hidayah Asshomadiyah Sukorejo Pasuruan” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁸ Indah Fitriyawati, “Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum Surabaya)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

⁹ Maimun Aqsha Lubis dkk., “Systematic Steps in Teaching and Learning Islamic Education in the Classroom,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 7 (2010): 665–70, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.090>.

masyarakat. Peran serta masyarakat dalam eksistensi pesantren disebabkan dari figur sentral kiai yang memiliki kharisma sebagai pemimpin di pesantren maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga pesantren memiliki beberapa elemen dasar yang merupakan ciri khas dari pesantren itu sendiri (Zamakhsyari Dhofier) diantaranya yaitu: (a) pondok atau asrama, (b) tempat belajar mengajar, (c) santri, (d) pengajaran kitab-kitab agama, (e) kiai dan ustadz.¹⁰

Ada tiga elemen dasar yang membentuk pondok pesantren sebagai subkultur. *Pertama*, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara; *Kedua*, penggunaan kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan berabad-abad lamanya; dan yang *Ketiga*, sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.¹¹ Berdasarkan elemen yang ketiga, dapat dinyatakan Pondok Pesantren memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi salah satu penopang pilar utama pendidikan di bumi nusantara. Sejarah mencatat bahwa pondok pesantren sampai saat ini telah berdiri, tumbuh, dan berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa jutaan orang orang Indonesia telah ikut merasakan pola pembelajaran di pondok pesantren.¹²

Pemerintah membagi jenis pendidikan dan pengajaran menjadi: a. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak; b. Pendidikan dan pengajaran rendah; c. Pendidikan dan pengajaran menengah; dan d. Pendidikan dan pengajaran tinggi (UU Nomor 4 Tahun 1950, Bab V, Pasal 6 ayat 1). Berdasarkan pembagian jenis-jenis pendidikan tersebut, pesantren tidak termasuk yang diatur dalam jenis-jenis pendidikan. Pemerintah belum memiliki komitmen dan political will bagi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan (pesantren). Pesantren tidak diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954. Pesantren belum diperhitungkan sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional karena dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 pesantren belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.¹³

Pada saat ini pesantren sudah mulai diakui karena, sudah mulai banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, PP 55 Tahun 2007 dan PMA tentang Pesantren. meskipun pesantren di indonesia telah mendapat pengakuan dalam UU No 20 Tahun 2003 dan PP 55 Tahun 2007 terkadang masih marjinal dan terdiskriminasi dalam Sistem Pendidikan Nasional secara keseluruhan. Sebagian pakar menyebut sistem pendidikan Islam di

¹⁰ Hamruni Hamruni, "The challenge and the prospect of pesantren in historical review," *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2016): 413.

¹¹ Abdurrahman Wahid dan M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan pembaharuan* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988).

¹² H. Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren* (Elex Media Komputindo, 2014).

¹³ Fatimah Nur Rahma dkk., "Implementasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Pesantren Taruna Al Qur'an Putri Yogyakarta Masa Darurat Covid-19," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021): 2027–36.

pesantren bersifat ‘fikh oriented atau *nahwu oriented*. Penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak memiliki kurikulum tertulis. Kiai berperan utama sebagai kurikulum aktual yang mengarahkan program pembelajaran dan seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan pribadi kiai sebagai pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren.¹⁴

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan menciptakan tata nilai atau aturan baru untuk masyarakat yang dikeluarkan suatu organisasi atau lembaga. Berbeda dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*), kebijakan memiliki sifat adaptif dan interpretatif, walaupun kebijakan sendiri juga mengatur apa yang boleh dan tidak diperbolehkan.¹⁵ Kebijakan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan dan hasil perumusan langkah strategis yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dengan waktu yang ditentukan.¹⁶

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya.¹⁷ Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap santri Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara penanya (peneliti) dengan penjawab atau informan (objek peneliti). Sedangkan menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jawaban-jawaban dari informan kemudian akan dicatat atau direkam dengan menggunakan alat perekam seperti *tape recorder*. Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi

¹⁴ Lailial Muhtifah, “Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren Kasus Al-Mukhlisin Mempawah Kalimantan Barat,” *Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 2 (19 Februari 2016): 203, <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.507>.

¹⁵ Arwildayanto, Sukung, dan Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan : Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*.

¹⁶ Umar Sidiq dan Wiwin Widyawati, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia* (Ponorogo: Nata Karya, 2019).

¹⁷ Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi* (Jakarta: LPSP3 UI, 1998), h. 29.

dengan pihak-pihak terkait atau subyek penelitian, yaitu santri Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membentuk karakter Islami, Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya memiliki kebijakan untuk mengatur para santri mengikuti kegiatan yang terstruktur setiap harinya. Dari hasil wawancara, kegiatan di Pesantren Amanah mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali dapat dilihat lewat tabel berikut;

Hari									
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu		
w a k t u	03.00 - subuh	Bangun, tahajud, dan shalat Subuh							
	Subuh 05.30	Muhasadatsah	Bimbingan bersama ustadz/ustadzah		Muhasadatsah	Bimbingan bersama ustadz/ustadzah		Tanzhiful 'Am & Muhasadatsah	
	05.30 - 06.50	Mandi, makan, persiapan ke sekolah.						Olahraga bersama & makan	
	06.50 - 09.00	KBM di Sekolah						Free	
	09.00 - 09.40	Shalat Dhuha							
	09.40 - 10.00	Istirahat							
	10.00 - 12.00	KBM di Sekolah							
	12.00 - 12.50	ISHOMA (Khusus Jumat, shalat Jumat)							
	12.50 - 15.00	KBM di Sekolah						Free	
	15.00 - 15.15	Shalat Ashar+tadarus							
	15.15 - 17.00	Ekskul						Free	

17.00 - 17.30	Persiapan Shalat Maghrib	
17.30 - 18.30	Shalat Maghrib+bimbingan bersama ustadz/ustadzah (kecuali hari Minggu)	
18.30 - Isya	Makan	
Shalat Isya + tadarus		
Isya - 22.00	Mufradat, tahkim-an, dan belajar malam.	<i>Free</i>
22.00 - 03.00	Tidur	

Dalam mengatur kegiatan para santrinya, Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya banyak memasukan unsur - unsur Islami. Salah satunya dalam hal ibadah. Seperti yang dapat dilihat dari tabel diatas, setiap hari para santri Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya melaksanakan shalat tahajud. Shalat tahajud merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang tidak mudah untuk dilakukan. Jangankan untuk orang yang belum baligh, orang dewasa saja masih kesulitan melaksanakannya. Hal itu karena waktu pelaksanaan shalat tahajud adalah di sepertiga malam. Meskipun shalat tahajud dapat dilaksanakan setelah shalat Isya, namun yang paling utama waktu pelaksanaannya adalah pada sepertiga malam sekitar pukul dua atau tiga malam dimana masih banyak orang yang tidur saat itu.

Lalu pembiasaan pelaksanaan shalat Dhuha yang dilaksanakan setiap pagi. Menurut kepercayaan umat Islam, shalat Dhuha dapat mendatangkan rezeki. Diharapkan dengan melaksanakan shalat Dhuha, seluruh urusan para santri di hari itu dapat terlaksana dengan lebih lancar dan baik. Shalat Dhuha juga termasuk ibadah yang mudah dilaksanakan namun, banyak dilupakan. Hal ini karena waktu pelaksanaan shalat Dhuha yang dimulai setelah terbitnya matahari hingga sebelum tergelincirnya matahari, dimana waktu tersebut merupakan waktu manusia sibuk beraktivitas. Begitu juga dengan aktivitas ibadah lainnya seperti shalat berjamaah, tadarus dan mengaji bersama.

Selain dalam hal kegiatan sehari - hari, kebijakan Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya juga merambat ke ranah cara berpakaian. Untuk mencerminkan cara berpakaian yang islami, Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya memiliki beberapa kebijakan diantaranya: bagi laki - laki diharuskan memakai celana panjang yang tidak ketat, baju sopan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, mengenakan peci ketika shalat dan memakai seragam sekolah saat jam sekolah; untuk perempuan diharuskan mengenakan kerudung yang panjangnya menutup dada, pakaian yang longgar (tidak ketat sampai memperlihatkan lekuk tubuh), memakai ciput dan kaos

kaki setiap keluar area komplek banat (anak perempuan), memakai celana hanya saat jadwal olahraga dan tidur, memakai mukena saat pelaksanaan shalat dan memakai seragam sekolah saat jam sekolah.

Lalu ada kebijakan dari Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya kepada santrinya untuk mematuhi kebijakan dari organisasi santri. Karena Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah, maka organisasi untuk tingkat pelajar yang berlaku adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM. Di Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya sendiri terdapat beberapa tingkatan organisasi IPM. Di tingkat sekolah terdapat empat Pimpinan Ranting yaitu Pimpinan Ranting IPM putra SMP Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Pimpinan Ranting IPM putri SMP Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Pimpinan Ranting IPM putra SMA Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, dan Pimpinan Ranting IPM putri SMA Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.

Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya mendapat keistimewaan dalam mengadakan organisasi IPM yaitu, terpisahnya antara pimpinan putra dan putri. Dan karena ada dua Pimpinan Ranting untuk setiap kelompok yaitu putra dan putri, sesuai dengan peraturan Pimpinan Pusat IPM, maka dapat diadakan Pimpinan Cabang di Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Satu Pimpinan Cabang Putra Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, dua Pimpinan Cabang Putri Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Pimpinan Cabang inilah yang nantinya akan ikut membuat kebijakan untuk para santri.

Jika dilihat di tabel kegiatan sehari - hari Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa kegiatan yang bernama *Tanzhiful 'Am, muhadatsah, mufradat* dan tahkim-an. Kegiatan - kegiatan tersebut pelaksanaannya dipimpin oleh Pimpinan Cabang IPM baik putra maupun putri. Pertama *Tanzhiful 'Am, Tanzhiful 'Am* berasal dari bahasa Arab yang artinya pembersihan umum. Sesuai dengan maknanya, kegiatan ini berisikan kegiatan membersihkan seluruh tempat umum di pesantren Amanah. Kegiatan ini berlandaskan dengan hadits riwayat Muslim yang berbunyi:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Kebersihan itu sebagian dari iman” (H.R. Muslim).

Mulai dari kamar masing - masing, kamar mandi, Masjid, lapangan, aula, halaman, hingga jemuran. Biasanya Bidang Lingkungan Hidup Pimpinan Cabang IPM akan membuat pembagian kelompok untuk membersihkan setiap area. Selain itu, akan ada perwakilan satu orang dari Pimpinan Cabang IPM di setiap tempat untuk memonitoring.

Kedua ada *muhadatsah*. *Muhadatsah* juga berasal dari bahasa Arab yang artinya percakapan. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini berisikan mempelajari percakapan baik bahasa

Arab atau Inggris yang dipimpin oleh Bidang Kebahasaan Pimpinan Cabang IPM baik putra maupun putri. Biasanya santri akan diberikan satu atau dua kalimat idiom, lalu diminta untuk mempraktekkan sebuah percakapan sesuai tema bersama temannya. Percakapan ini terkadang diberi oleh Bidang Kebahasaan sendiri, atau dibuat oleh santri sendiri dari malam hari.

Ketiga *mufradat* atau dalam bahasa Arab artinya kosa kata. Pada malam hari setelah melaksanakan shalat Isya dan tadarus, para santri akan diberikan tiga kosa kata bahasa Arab atau Inggris sesuai dengan jadwalnya oleh pengurus pimpinan cabang IPM. pelaksanaannya biasa dilaksanakan perangkatan bertempat di masjid, depan kamar, aula, atau balkon. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan tahkim-an berupa pemberian hukuman kepada santri yang melanggar peraturan - peraturan yang telah dibuat. Cara memberitahu siapa saja yang dapat hukuman, adalah dengan mengumumkannya lewat *speaker* pimpinan cabang IPM putra dan putri. Hukuman yang diberikan berupa hal yang dapat mendidik santri berupa menghafal kosa kata bahasa Arab/Inggris, menghafal ayat Al-Quran, menghafal hadits, menghafal idiom, berlari mengelilingi lapangan, dan sekaligus menjadi mata - mata. Mata - mata disini bertugas untuk mencari temannya yang melanggar peraturan seperti yang dia lakukan. Saat sore hari, mereka akan menyetorkan hafalan dan laporan mata - matanya.

SIMPULAN

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan menciptakan tata nilai atau aturan baru untuk masyarakat yang dikeluarkan suatu organisasi atau lembaga. Dalam membentuk karakter Islami, Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya memiliki kebijakan untuk mengatur para santri mengikuti kegiatan yang terstruktur setiap harinya. Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya banyak memasukan unsur - unsur Islami diantaranya dalam hal ibadah seperti sholat tahajud, sholat dhuha, sholat berjamaah serta tadarus dan mengaji bersama, *Tanzhiful 'Am, muhadatsah, mufradat, muhadatsah* . Untuk kebijakan dalam cara berpakaian yakni mencerminkan pakaian yang islami dan salah satu kebijakan yang lainnya yaitu santrinya harus mematuhi kebijakan organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Beberapa kebijakan tersebut tentunya merupakan upaya dari pihak pesantren untuk membentuk karakter santri islami yang sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Arifin Suling, dan Warni Tune Sumar. *Analisis Kebijakan Pendidikan : Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press, 2018.
- Asrori, Izzu. "Peran pesantren dalam mengontrol perilaku santri: studi Pondok Pesantren Al-Hidayah Asshomadiyah Sukorejo Pasuruan." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

- Fitria Rayani Rahman, Intan Oktaviani Agustina, Siti Zahra Al Munawaroh : Peran Kebijakan Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Dalam Membentuk Karakter Islami
- Diastuti, Indah Mei, dan Agus Sulton. "The Effectiveness of Problem Based Learning (PBL) Method Through Marquee Model to Cultivate Literacy." *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 4, no. 2 (2020).
- Fitriyawati, Indah. "Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum Surabaya)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Hamruni, Hamruni. "The challenge and the prospect of pesantren in historical review." *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2016): 413.
- Kahar, Syadidul, Muhammad Irsan Baru, dan Candra Wijaya. "Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 2 (2019): 170–78.
- Lubis, Maimun Aqsha, Melor Md Yunus, Mohamed Amin Embi, Sabariah Sulaiman, dan Zamri Mahamod. "Systematic Steps in Teaching and Learning Islamic Education in the Classroom." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 7 (2010): 665–70. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.090>.
- Muhtifah, Lailial. "Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren Kasus Al-Mukhlisin Mempawah Kalimantan Barat." *Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 2 (19 Februari 2016): 203. <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.507>.
- Nuraeni, Nuraeni. "Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren." *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 3, no. 1 (2021): 1–14.
- Poerwandari, Elizabeth Kristi. *Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 UI, 1998.
- Purba, Sukarman, Erika Revida, Andi Febriana Tamrin, Erniati Bachtiar, Bonaraja Purba, Yulia Rizki Ramadhani, Pratiwi Bernadetta Purba, Dina Chamidah, Janner Simarmata, dan Ika Yuniwati. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rahma, Fatimah Nur, M. Syahrul Qhodi Alam, Burhanudin Ahmad Fauzi, Fransisca Wulandari, dan Imam Safii. "Implementasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Pesantren Taruna Al Qur'an Putri Yogyakarta Masa Darurat Covid-19." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021): 2027–36.
- Sidiq, Umar, dan Wiwin Widyawati. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Suryana, Aep Tata, Tatang Ibrahim, Muslem Daud, Hery Saparudin, dan Acep Nurlaeli. "Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia." *JURNAL SERAMBI ILMU* 21, no. 2 (2020): 273–86.
- Umar, H. Nasaruddin. *Rethinking Pesantren*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahid, Abdurrahman, dan M. Dawam Rahardjo. *Pesantren dan pembaharuan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988.